

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
KECAMATAN PADAMARA KAB. PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

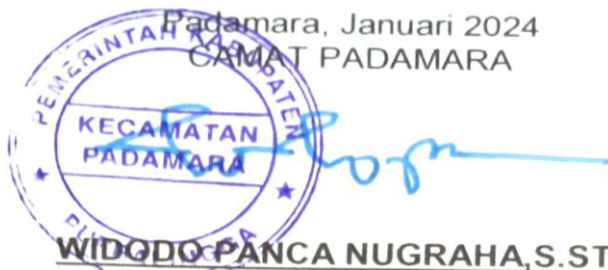
Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Terwujudnya Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN yang bersinergi dalam melaksanakan semua program kerja, dan harapan kami kedepan agar kegiatan dan capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan statusnya dan bisa ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Padamara pada tahun-tahun yang akan datang.

Padamara, Januari 2024
CAMAT PADAMARA



WIDODO PANCA NUGRAHA, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19820116 200012 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja disbanding kargetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Padamara tahun 2021-2026.

Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaranyang dikelola oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. **2.656.680.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **2.471.435.741,-** atau mencapai **93,03%**. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Padamara dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 adalah 100% dari Target IKM sebesar **87,2** dengan realisasi sebesar **88,75**, sedangkan untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padamara (**AKIP**) Indikator Nilai SAKIP Kecamatan disimpulkan bahwa masih perlu perbaikan pada unit kerja ,komitmen menejemen serta pengukuran kinerja dari target Nilai SAKIP **64** dapat terealisasi **65,26**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padamara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga

Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Table	
Daftar Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sistematika Penulisan	

BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran	

BAB IV PENUTUP	
-----------------------------	--

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Rencana Aksi
3. IKU Kecamatan Padamara
4. Rencana Kinerja Tahunan
5. Cascading

DAFTAR TABLE

Table 1.1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kecamatan Padamara	
Table 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara	
Table 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	
Table 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	
Table 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang	
Table 1.6 Komposisi SDM Berdasarkan Fungsi	
Table 1.7 Daftar PNS di Kecamatan Padamara	
Table 1.8 Daftar Nama Pegawai Honorer / Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL)	
Table 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Table 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	
Table 3.2 Target dan Realisasi Kinerja	
Table 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKM dengan Tahun Sebelumnya	
Table 3.4 Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara	
Table 3.5 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara	
Table 3.6 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Padamara	
Table 3.7 Kategori Mutu Pelayanan	
Table 3.8 Kategori Unsur Layanan Pada Unit Layanan Kecamatan Padamara	
Table 3.9 Kategori Penilaian Evaluasi Atas SKIP	
Table 3.10 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP	
Table 3.11 Target dan Realisasi SAKIP	
Table 3.12 Perbandingan Realisasi SAKIP dengan Tahun Sebelumnya	
Table 3.13 Analisis Atas Efektifitas Pengguna Anggaran	
Table 3.14 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
Table 3.15 Realisasi Anggaran Tahun 2023	
Table 3.16 Efisiensi Anggaran Tahun 2023	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi pada hasil, maka perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun Anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Padamara selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Padamara sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawabanyang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Padamara Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja ini juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah yaitu

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

6. Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di kabupaten Purbalingga.

b. Kondisi Umum Kecamatan Padamara

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kecamatan Padamara dengan luas wilayah 1.768,006 ha, terdiri dari tanah kering seluas 699,231 ha dan tanah sawah seluas 1068,775 ha dengan kondisi udara dan curah hujan sedang. Wilayah Kecamatan Padamara terdiri dari 1 Kelurahan, 13 Desa, 38 dusun, 60 RW dan 243 RT dan terletak di bagian barat Kabupaten Purbalingga dengan jarak kurang lebih 7 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.

Wilayah Kecamatan Padamara memiliki kedudukan geografis yang sangat strategis sebagai jalur alternative dengan tingkat aksesibilitas (keteraksesan/ketercapaian) yang tinggi ke wilayah Kabupaten Banyumas sehingga menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat.

2. Batas Administrasi

Batas administrasi Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kutasari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kalimanah
- Sebelah Timur : Kecamatan Purbalingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

3. Pembagian Wilayah Administrasi

Perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kecamatan Padamara

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	Karangsentul	58,10	-	3	15
2	Karangpule	95,222	2	2	9
3	Karangjambe	149,7	4	4	19
4	Sokawera	115,6	3	6	16
5	Bojanegara	115,5	3	5	37
6	Gemuruh	180,376	3	8	9
7	Dawuhan	224,06	5	5	20
8	Prigi	139,892	2	4	14
9	Purbayasa	94,998	2	4	12
10	Karanggambas	146,317	3	5	22
11	Mipiran	134,363	3	6	17
12	Kalitinggar	89,526	3	3	15
13	Kalitinggar Kidul	84,247	2	2	9
14	Padamara	140,105	3	3	19
	JUMLAH	1768,006	38	60	243

4. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara pada tahun 2023 sebanyak **46.906** orang yang terdiri dari penduduk laki-laki **23.596** (50,31%) orang dan penduduk perempuan sebanyak **23.309** (49,69%) orang yang tersebar di 13 (tigabelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
JumlahPendudukKecamatanPadamara

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	Karangsentul	1368	1395	2763
2	Karangpule	822	743	1565
3	Karangjambe	2066	2042	4108
4	Sokawera	1382	1340	2722
5	Bojanegara	3201	3158	6359
6	Gemuruh	2341	2264	4605
7	Dawuhan	2200	2268	4468
8	Prigi	1540	1513	3053
9	Purbayasa	1213	1203	2416
10	Karanggambas	2076	2065	4141
11	Mipiran	1642	1607	3249
12	Kalitinggar	1322	1296	2618
13	Kalitinggar Kidul	969	909	1878
14	Padamara	1454	1506	2960
Jumlah		23.596	23.309	46.906

5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KecamatanPadamara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
- c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- h. Kelurahan.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Padamara sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Padamara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki – laki	9orang	52,94
2	Perempuan	8orang	47,06
	JUMLAH	17 orang	100

Dari jumlah tersebut pegawai dengan pendidikan pendidikan S1 menduduki urutan pertama yaitu sejumlah 9 orang (52.94%), disusul dengan pegawai dengan klasifikasi pendidikan SLTA/ sederajat sejumlah 6 orang (35.294%), pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda sejumlah 1 orang (5.883%), pegawai dengan pendidikan SLTP sejumlah 0 orang (0%) , serta pegawai dengan pendidikan SD sejumlah 1 orang (6%), seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sarjana (S1)	9orang	52,94
2	Diploma (D3)	1 orang	5.883
3	SLTA	6orang	35.294
3	SLTP	0 orang	0,00
4	SD	1 orang	5.883
	JUMLAH	17 Orang	100

Dari komposisi Golongan, PNS dengan Golongan IV berjumlah 1 orang (10%), PNS Golongan III merupakan yang paling banyak jumlahnya 9 Orang (56 %), PNS Golongan II sejumlah 2 orang (17 %), seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Menurut Golongan / Ruang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	%
1	Golongan IV	1 Orang	12
2	Golongan III	8 Orang	46
3	Golongan II	2 Orang	18
4	Golongan I	-	-
5	Tenaga Kontrak	6orang	24
	JUMLAH	17 Orang	100

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Padamara sebanyak 17 orang, dengan komposisi SDM berdasarkan Fungsi dapat dilihat ada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Komposisi SDM berdasarkan Fungsi

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala / Camat	1		1
2	Sekretaris a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1		1
		1	2	3
		2	3	5
3.	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3		3
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2	2
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	1	2
Jumlah Total		8	9	17

Sedangkan Pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan yang dipersyaratkan, untuk pejabat eselon III dari 1 jabatan semua sudah mengikuti

Diklat Pim III. Sedangkan untuk pejabat eselon IV sejumlah 1 orang, yang sudah mengikuti diklatpim IV sebanyak 1 orang sedangkan 5 orang belum mengikuti diklat, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Adapun komposisi SDM tersebut berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan golongan/ruang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7

Daftar PNS di kecamatan Padamara

No	Nama Pegawai/ NIP	Jabatan/ Golongan	Dikla tpim	Pend	Tempat/ Tgl Lahir
1.	Sarno, SIP NIP. 196506221990121001	Camat IV/a	Dikla tpim III	S1	Banyumas 22-06-1965
2.	Slamet Triyantoi, S.Sos NIP. 196706251993111001	Sekretaris Kecamatan III/d	Dikla tpim IV	S1	Purbalingg, 25-06-1967
3.	Embar Yudiyanto, S.Sos NIP. 196603271994031005	Kasi Pemerintaha, Ketenteraman dan Ketertiban Umum III/d		S1	Banjarnegar a 27-03- 1966
4.	Tri Puji Mulyani, S.Sos NIP. 197802172010012003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat III/c		S1	Purbalingga 17-02-1978
5.	Sumarno, SH NIP 196602031989031010	Kasi Kesra III.d		S 1	Karanganyar , 03-02-1966
6.	Rusno, SH NIP. 197002092010011002	Kasubag Perencanaan dan Keuangan III/b		S1	Purbalingga 09-02-1970
7.	Susi Handayani, SE NIP. 197502232000122001	Kasubag Umum dan kepegawaian III/d		S1	Purbalingga 23-02-1975
8.	Aris Priyanto NIP. 196510301990031007	Petugas Keamanan (Satpol PP) III/a		SLTA	Purbalingga 30-10-1965
9.	Susanti NIP. 198607092006042002	Pengelola Keuangan III/a		SLTA	Purbalingga 09-07-1986
10	Tuginem NIP. 196807272008012010	Pengadministrasi Umum II/d		SLTA	Semarang 27-07-1968

11	Novi Nuryani NIP 19831105200912006	Pengadministrasi an Keuangan II/d		SLTA	Jakarta, 5- 11-1983
----	--	---	--	------	------------------------

Jumlah Pegawai honorer di kecamatan Padamara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.8
DAFTAR NAMA PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)

No	Nama Lengkap	Pend	Pejabat Yang TTD SK	No. SK/Tgl SK	Jenis Pekerjaan
1	Narpun	SD	Bupati Purbalingg a	814/03/2004 29/3/2004	Petugas Kebersihan
2	Anggun Rokhmawati, S.Pd	S1	Camat Padamara	800/31/2020 01/10/2020	Operator Komputer
3	Roy Bamindha Prima, ST	S1	Camat Padamara	814/17/2021 02-06-2021	Operator Komputer
4	PanjerWisnuLegowo	SMA	Camat Padamara	814/37/2021 02-06-2021	Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum
5	Adisti Candra Swandini, S.Pd	SI	Camat Padamara	814/106.a /2023	Operator Komputer
6	Laila Nur Hidayah	SMA	Camat Padamara	814/190.a 01/03/2022	Operator Komputer

6. Permasalahan yang dihadapi

Hambatan serta permasalahan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara khususnya di wilayah Kecamatan Padamara Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya Tenaga Aparatur Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- b. Masih belum meratanya pengetahuan akan Undang-undang atau aturan terkait dengan isu dan masalah yang dihadapi oleh Kecamatan.
- c. Sering terjadi masalah pada alat rekam KTP karena gangguan jaringan internet sehingga pelayanan masyarakat sering terganggu,

- d. Masyarakat di kecamatan Padamara yang terdiri dari berbagai latar belakang baik pendidikan, mata pencaharian dan lain-lain sehingga menciptakan emosional yang berbeda-beda dalam permintaan pelayanan umum.

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Maksud

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Padamara, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 adalah :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Padamara dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Padamara.
- c. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Camat kepada publik atas kinerja setiap kegiatan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2023.
- d. Sebagai masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate serta transparan* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
- f. Untuk perbaikankinerja dan peningkatanakuntabilitaskinerjaKecamatanPadamara.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. SistematikaPenulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. RencanaAksi
3. IKU KecamatanPadamara
4. Rencana Kinerja Tahunan
5. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
6. Cascading

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padamara Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perencanaan kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2022 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah:

***"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat,

- berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul – simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
 6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jumlah anggaran pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.656.680.000,00 dipergunakan untuk melaksanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 2. 484.177.000,00.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 61.762.000,00.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 34.591.000,00.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 30.850.000,00.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 45.300.000,00.

Untuk lebih jelas dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Tabel dan pada lampiran Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Padamara..

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	87,2
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	87,2
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	65

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Padamaramelaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	SangatTinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	SangatRendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing target sasaran dari yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tujuan:

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Kecamatan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 dilakukan dengan Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 88,75 % dengan predikat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 3.2

Target dan Realisasi IKM

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,2	88,75	101,77
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,2	88,75	101,77
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	64	65,26	101,96
Rata –rata capaian kinerja Tahun 2023							101,86

Dari tabel di atas pencapaian atas Indikator Utama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 menunjukan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,86 % . atau katagori Sangat Tinggi

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sertaCapaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan BeberapaTahunTerakhir

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi IKM dengan Tahun sebelumnya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Uraian	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)				(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	84,83	84	85	86	87,2
				Realisasi	84,83	84,95	84,97	87,2	88,75
				Capaian %	100	101,13	99,96	101,39	101,77

Berdasarkan pengukuran kinerja tujuan perangkat daerah sebagaimana tabel di atas, dapatdisimpulkan bahwa:

Capaian indicator utama terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapaisebesar 88,75 % atau dikategorikan Baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai denganTahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

Dalam laporan ini Kecamatan Padamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2023

setelah dilaksanakan revidi atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan satu indikator kinerja adalah sebesar 101,77% dengan predikat Sangat Berhasil.

Capaian Indikator Kinerja ini apabila di bandingkan dengan target Renstra tahun 2026 dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Tujuan	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Prosentase Capaian
Indek Kepuasan Masyarakat	88,75	90	98,61

Indikator Kinerja Tujuan, pada tahun 2023 realisasi capaiannya sebesar 88,75 persen, realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021-2026 sebesar 90 persen, maka prosentase capaian realisasi sebesar 98,61 persen

Pengukuran/perhitungan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang merupakan pengukuran dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Padamara, hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :

3.1 Gambaran Umum Responden Survei Kepuasan Masyarakat

Responden dalam penelitian ini adalah orang atau pelanggan di Kecamatan Padamara. Responden yang dilakukan survei merupakan masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan di Kecamatan Padamara.

Dalam penelitian ini diambil jumlah responden sebanyak 223 responden. Gambaran umum responden dilakukan guna mengetahui gambaran sampel yang

diambil dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Padamara. Rincian terkait identitas responden sebagai berikut :

1. Umur

Gambaran umum responden yang pertama adalah umur responden. Responden dalam survey adalah masyarakat yang memiliki usia lebih dari 17 tahun keatas, karena dianggap sudah dapat berpikir dewasa. Kelompok usia yang digunakan dalam survey kepuasan masyarakat ini adalah masyarakat dengan usia 17 tahun sampai dengan >60 tahun yang pernah melakukan pengelolaan administrasi di Kecamatan Padamara. Persebaran usia responden dalam survey dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	17 – 20 tahun	74	33,33%
2	21 – 30 tahun	46	20,67%
3	31 – 40 tahun	44	20,00%
4	41 – 50 tahun	34	15,33%
5	51 – 60 tahun	19	8,67%
6	>60 tahun	6	2,00%
Total		223	100,00%

Berdasarkan tabel diatas didapatkan informasi bahwa dari 223 responden yang berumur antara 17-20 tahun sebanyak 74 orang (33,33%), responden yang berumur antara 21-30 tahun sebanyak 46 orang (20,67%), responden yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 44 orang (20,00%), responden yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 34 orang (15,33%), responden yang berumur antara 51-60 tahun sebanyak 19 orang (8,67%), sedangkan responden yang berumur >60 tahun sebanyak 6 orang (2,00%). Jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan usia 17-20 tahun, yaitu sebanyak 74 orang (33,33%).

2. Jenis Kelamin

Gambaran umum responden yang kedua adalah jenis kelamin responden. Perbandingan jenis kelamin responden dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	133	60,00%
2	Perempuan	90	40,00%
Total		223	100%

Berdasarkan tabel diatas didapatkan informasi bahwa dari 223 responden, yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 133 orang atau 60,00%, sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 90 orang atau 40,00%.

3. Pekerjaan Utama

Gambaran umum responden yang ketiga adalah jenis pekerjaan anresponden. Variasi pekerjaan responden dalam survey kepuasan masyarakat Kecamatan Padamara bermacam-macam, mulai dari pelajar/mahasiswa, pegawai swasta sampai dengan pegawai negeri. Variasi pekerjaan responden Kecamatan Padamara tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Padamara

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	8	4,00%
2	Pegawai Swasta	20	9,33%
3	Wiraswasta	46	20,67%
4	Pelajar/Mahasiswa	59	26,67
5	Lainnya	87	39,33
Total		223	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas didapatkan informasi bahwa dari 223 responden dari Kecamatan Padamara yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 8 orang (4,00%), selanjutnya yang bekerja sebaga iPegawai Swasta sebanyak 20 orang(9,33%), yang bekerjasebagaiWiraswastasebanyak 46 orang(20,67%), yang bekerjasebagaiPelajar/Mahasiswasebanyak 50 orang(26,67%), sedangkan yang bekerjaselain yang disebutkansebanyak 87 orang(39,33%). Paling banyakrespondenmemilikipekerjaanutamasebagailainnya, yaitusejumlah 87 orang(39,33%).

3.2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan caramembagi total nilai persepsi per unsure dengan total unsur yang terisi,kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakniantara 25-100, makahasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25 Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.8
KategoriMutuPelayanan

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TidakBaik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KurangBaik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SangatBaik

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistic deskriptif .Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsure .Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara.

Tabel 3.9

Kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara

No	Unsur Pelayanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persyaratan	1	1	23	198	223
		0,45	0,45	10,31	88,79	100%
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1	0	99	123	223
		0,45	0	44,39	55,16	100%
3	Waktu Pelaksanaan	1	1	24	197	223
		0,45	0,45	10,76	88,34	100%
4	Biaya Tarif	0	1	107	115	223
		-	0,45	47,98	51,57	100%
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	1	1	129	92	223
		0,45	0,45	57,85	41,26	100%
6	Kompetensi Pelaksana	0	1	122	100	223
		-	0,45	54,71	44,84	100%
7	Prilaku Pelaksana	1	2	131	89	223
		0,45	0,90	58,74	39,91	100%
8	Sarana dan Prasarana	3	5	55	162	223
		1,35	2,24	24,66	72,65	100%
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	0	3	136	84	223
		-	1,35	60,99	37,67	100%
	Jumlah	8	15	826	1160	2009
		0,40	0,75	41,11	57,74	100%

Berdasarkan tabel SKM diatas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 88,75. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan biaya/tarif dengan nilai 3.568 sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur 3.107.

1. Unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa mayoritas responden menanggapi kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan dikecamatan Padamara BAIK, yakni dengan nilai IKM 3.140 dan mutu pelayanan (B). Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja masih butuh sosialisasi lagi antara lain dengan cara di temple dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

2. Unsur Prosedur

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Padamara pada unsur prosedur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3.247 Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang masuk kategori baik. Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Padamara sudah cukup baik dari unsure prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Namun, masyarakat .desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

3. Unsur Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamaradari unsur waktu pelayanan masuk kategori BAIK. Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu pelayanan sudah cepat. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai IKM 3,107. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

4. Unsur Biaya /Tarif

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamaradari unsur biaya masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,173. Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor kecamatan Padamara gratis.

5. Unsur Produk Layanan

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3.140. Dari hasil survey masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang dihasilkan Kecamatan Padamara masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Padamara dari unsure kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,247. Petugas telah terdidik dan pahamakan tugas dan fungsinya masing-masing di Kecamatan. Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survey yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian *front office* kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian *front office* yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapula kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan.

7. Unsur Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamaradari unsure perilaku pelaksana masuk dalam kategori BAIK dengan nilai IKM 3.233. Di unsure perilaku petugas hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

8. Maklumat Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan

antara lain mengenai lahan parkir khusus pengunjung. nilai unsur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,568.

9. Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dalam unsure penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survey adalah SANGAT BAIK yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal dan nilai IKM yang diperoleh senilai 3,568.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan public (*public service*) di Kantor Kecamatan Padamara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 3 (tiga).
2. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Padamara setelah dikonversikan 88,75 berada pada interval 81,26 – 100, Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Padamara adalah Sangat Baik.

4, Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang akan dilakukan.

a. Faktor pendorong keberhasilan antara lain:

- Monitoring dan evaluasi petugas pelayanan dilakukan secara berjenjang
- Sarana dan prasarana pendukung yang memadai
- SDM yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Adanya sumber dana untuk mendukung tugas pelayanan
- Adanya semangat dari petugas dalam melayani masyarakat
- Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
- Adanya kerja sama yang baik antar pegawai

b. Kendala yang dihadapi

- Keterbatasan Anggaran.
- SDM yang kurang memadai
- Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai

c. Solusi yang telah dilaksanakan

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang terhadap petugas
- Rapat bulanan bersama pejabat setruktural dalam rangka meningkatkan pelayanan
- Menyediakan bahan survey yang mudah di jangkao oleh masyarakat penerima layanan.
- Mengolah hasil survey yang dilakukan oleh penerima layanan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dari Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang akan dilakukan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Padamara yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya terget yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Padamara dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Laporan Kinerja Kecamatan Padamara dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Padamara sebesar 88,75 berada pada kategori “BAIK” hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Pemerintah kecamatan Padamara yang ada sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.

Program/kegiatan yang mendukung sasaran adalah:

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ditindaklanjuti
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Sasaran meningkatnya implementasi SAKIP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Tabel 3.10

Katagori Penilaian Evaluasi Atas SAKIP

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	≥90-100	SangatMemuaskan
2	A	≥80-90	Memuaskan
3	BB	≥70-80	Sangat Baik
4	B	≥60-70	Baik
5	CC	≥50-60	Cukup (Memadai)
6	C	≥30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Padamara tahun 2023 berdasarkan hasilpenilaian dari Tim Evaluasi AKIP Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 3.11

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	22.20
2	Pengukuran Kinerja	30,30	4,20	5,40	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,70	3,75	8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,00	4,50	7,50	15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,70	18,90	30,76	65,26

Berdasarkan tabel AKIP di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai dengan angka 65,26 dengan kategori BAIK. Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Rencana Aksi belum berjalan secara dinamis sebab target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulanan serta belum di dokumentasikan dan dilaksanakan secara memadai, hal-hal yang perlu ditindak lanjuti dalam komponen Perencanaan Kinerja:

- a. Memastikan Rencana Aksi digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai agar dapat mendukung tercapainya kinerja organisasi
- c. Mendokumentasikan hasil rapat (dibuat notulen) dan dipantau tindak lanjut hasil rapat kinerja organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Aplikasi satu data purbalingga sudah di manfaatkan oleh kecamatan Padamara meskipun belum maksimal dan belum terintegrasi dengan Aplikasi lain seperti Aplikasi pengukuran kinerja
- b. Aplikasi E-AKIP belum dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
- c. Rapat Monitoring dan Evaluasi pengukuran dan pencapaian kinerja triwulanan belum menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan, kendala, permasalahan yang di hadapi.
- d. Belum di dokumentasikan capaian kinerja triwulanan
- e. Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tetapi aplikasi e-kinerja belum menggamabarkan capaian kinerja yang sesungguhnya.

Komponen Pengukuran kinerja yang perlu di tindaklanjuti

- 1) Mendukung penggunaan Aplikasi untuk mengukur capaian kinerja
- 2) Mengevaluasi, memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaan program untuk perbaikan kinerja dan di dokumentasikan secara lengkap
- 3) Memastikan kinerja yang dilaporkan pada aplikasi e-kinerjasesuaidengancapaian riil tiap pegawai

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan kinerja baik triwulan maupun tahunan yang menggambarkan capaian kinerja telah dibuat. Informasi atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja serta upaya perbaikannya sudah ada, namun faktor – faktor yang menjadi penyebab atas keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja perlu pendalaman lebih lanjut dan disesuaikan kondisi actual.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Meskipun monitoring dan evaluasi atas realisasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.
- c. Laporan kinerja sudah membandingkan pencapaian kinerja antara target dengan realisasi, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan jangka menengah, serta analisa efisiensi anggaran, namun belum menyajikan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut.

Komponen Pelaporan Kinerja yang perlu di tindaklanjuti :

1. Untuk dapat meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor – faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja
2. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai
3. Dalam pelaporan kinerja agar dapat disajikan analisis efisiensi anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan, namun target – target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan. Hal-hal yang perlu di tindak lanjuti agar dapat menggunakan rencana aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja triwulanan.
- b) Kecamatan Padamara telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal. sehingga perlu meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, sosialisasi maupun webinar
- c) Rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan dengan bidang – bidang terkait namun monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi – rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik .Sehinggaperlu meningkatkan implementasi SAKIP dengan cara meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi dan mendokumentasikan serta memonitoring pelaksanaannya secara berkala.
- d) Diperlukan pendalaman lebih lanjut atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian target kinerja. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indicator kinerja. Analisis atas efisiensi pengguna anggaran juga belum dilakukan secara berkala, monitoring hanya dilakukan sebatas laporan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. sehingga perlu di tindaklanjuti dalam hal penyusunan laporan/matri ktindaklanjuti evaluasi SAKIP.

1) Analisis keberhasilan/kegagalan SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2023 yang disajikan oleh kantor kecamatan Padamara dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Kantor Kecamatan Padamara dengan nilai sebesar 65,26 dengan kategori B (baik), Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, kami akan melakukan perbaikan/solusi sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK dan IKU)
2. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja.
3. Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKJP
4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan evaluasi internal
5. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan
6. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
7. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
8. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
9. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
10. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2) Kendala/Hambatan

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
6. Jaringan Internet lemot (sinyal lemah)

3) Solusi yang dilaksanakan

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Padamara

4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menambah Kapasitas Internet

4) Program/kegiatan yang mendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel. 3.12

Target dan Realisasi SAKIP

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	64	65,26	101,96	Tinggi	Kecamatan Padamara

Tabel.3.13

Perbandingan Realisasi SAKIP dengan tahun sebelumnya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Uraian	Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	Target	N/A	N/A	N/A	62	64
				Realisasi	N/A	N/A	N/A	57,91	65,26
				Capaian %	N/A	N/A	N/A	93,40	101,96

Capaian Indikator Kinerja ini apabila di bandingkan dengan target Renstra tahun 2026 dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

Tabel.3.14

Indikator Kinerja Tujuan	Capaian SAKIP Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Prosentase Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	65,26	70	93,22 %

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan evaluasi SAKIP dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai hasil level usia diatas implementasi SAKIP pada Kecamatan Padamara tahun 2023 adalah 65,26 dengan katagori BAIK dan mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai SAKIP pada tahun sebelumnya
2. Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah serta dapat memberikan dampak pada efisiensi dan efektifitas yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

5. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara
Tahun 2023

Tabel.3.14

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja				Efisiensi			Keterangan pencapaian
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Persen	100	99.09 %	100	1.325.000	1.313.000	99.09 %	Efisiensi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	Persen	100	98,70 %	100	925.000	913.000	98,70 %	Efisiensi
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100%	100	400.000	400.000	100 %	
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	92.72 %	100	2.163.269.000	2.005.707.575	92.72 %	Efisiensi

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	Persen	100	92,63 %	100	2.138.919.000	1.981.382.575	92,63 %	Efisiensi
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	100%	100	4.100.000	4.100.000	100 %	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persen	100	99,88 %	100	20.250.000	20.225.000	99,88 %	Efisiensi
III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Angka	100	83,33 %	102,86	1.500.000	1.250.000	83,33 %	Efisiensi
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	Angka	100	83,33 %	102,86	1.500.000	1.250.000	83,33 %	Efisiensi
IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Angka	100	98%	102,86	29.785.000	29.167.989	98%	Efisiensi
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	Persen	100	100%	100	1.000.000	1.000.000	100 %	
2	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Komponen Instalasi	Persen	100	99,95 %	100	18.085.000	18.075.280	99,95 %	Efisiensi

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
3	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Laporan	100	93,33 %	100	450.000	420.000	93,33 %	Efisiensi
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	100	99,97 %	100	1.750.000	1.749.409	99,97 %	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persen	100	99,17 %	100	3.000.000	2.975.000	99,17 %	Efisiensi
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen	100	90%	100	5.500.000	4.948.300	90%	Efisiensi
V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persen	100	100%	100	9.000.000	9.000.000	100 %	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100%	100	9.000.000	9.000.000	100%	
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Persen	100	98,74 %	100	152.477.000	150.052.418	98,74 %	Efisiensi

	DAERAH									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	0%	100	100.000	0	0%	Efisiensi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100	99,98 %	100	20.350.000	18.058.295	99,98 %	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen	100	87,38 %	100	1.500.000	1.499.600	87,38 %	Efisiensi
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	91,93 %	100	130.527.000	130.494.523	91,93 %	Efisiensi
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Persen	100	94,06 %	100	126.821.000	117.416.209	94,06 %	Efisiensi
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen	100	92%	100	115.811.000	106.466.209	92%	Efisiensi

	gan									
2	Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Angka	100	95,81 %	102,86	1.010.000	950.000	95,81 %	Efisiensi
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Angka	100	100%	102,86	10.000.000	10.000.000	100 %	
VIII	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Angka	3,5	29,99 %	102,86	60.750.000	58.205.500	29,99 %	Efisiensi
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	3,5	29,99 %	102,86	60.750.000	58.205.500	29,99 %	
IX	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	Laporan	3,5	99%	102,86	1.012.000	303.500	99%	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non	Laporan	3,5	99,92 %	102,86	1.012.000	303.500	99,92 %	

		Perijinan								
X	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	Persen	100	99,05 %	100	34.591.000	34.380.400	99,05 %	
1	PeningkatanPartisipasi Masyarakat Dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persen	100	99%	100	13.500.000	13.489.400	99%	
2	PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	100	98,60	100	21.091.000	20.891.000	98,60	Efisensi
XI	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAA N KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100%	100	30.850.000	30.489.150	100 %	
1	SinergitasdenganKepol isian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persen	100	97,70	100	25.850.000	25.489.150	95,25 %	Efisensi

		Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan								
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persen	100	89,31	100	5.000.000	5.000.000	100 %	
XII	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	Persen	100	89,31	100	45.300.000	43.150.000	95,25 %	Efisiensi
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persen	100	89,31	100	45.300.000	43.150.000	95,25 %	Efisiensi
JUMLAH							2.656.680.000	2.471.435.741	93,03 %	Efisiensi

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai dengan table di atas, dalam tahun 2023, upaya efisiensi anggaran telah dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian target dari masing-masing indikator program dan kegiatan yang sudah mencapai 100%, dengan realisasi anggaran yang dapat dihemat oleh Kecamatan Padamara

Tabel 3.15

Analisis Efisiensi pencapaian Tujuan Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	% Realisasi Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggran	Ket
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan						
		Indek Kepuasan Masyarakat	88,75	2.655.355.000,00	2.470.122.741,00	93,05	Efisiensi 6,95
2	Meningkatkan Implementasi SAKIP di Kecamatan						
		Nilai SAKIP Kecamatan	65,26	1.325.000,00	1.313.000,00	99,09	Efisiensi 0,91
	Jumlah			2.656..680.000,00	2.471.435.741,00	93,03%	

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan tahun 2023, untuk mencapai 2 Tujuan dan 2 Sasaran dianggarkan sebesar Rp 2.655.355.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.470.122.741,00 atau 93,03%. Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumberdaya, dilihat dari realisasi dana yang

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp 2.655.355.000,00 , dari anggaran sebesar Rp 2.655.355.000,00 terealisasi sebesar 2.470.122.741,00 (93,03%)

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilihat dari capaian nilai IKM Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga selalu meningkat selama 5 tahun terakhir.
- b. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.
- c. Penerapan kebijakan *smart regency* dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2. Meningkatkan Implementasi SAKIP di Kecamatan.

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumberdaya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 1.325.000,00 dari anggaran sebesar Rp 1.325.000,00,00 terealisasi sebesar Rp. 1.313.000,00 (99,09 %),

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Terintegrasinya istem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja.
- b. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan.
- c. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan Aplikasi e-Kinerja sebagai bahan efaluasi capaian kinerja ASN di Kecamatan Padamara.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	3	6	7	8
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.325.000	1.313.000	12.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	925.000	913.000	12.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	400.000	0
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.163.269.000	2.005.707.575	157.561.425
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.919.000	1.981.382.575	157.536.425
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.100.000	4.100.000	0

3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.250.000	20.225.000	25.000
III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.500.000	1.250.000	250.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.250.000	250.000
IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29.785.000	29.167.989	617.011
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	0
2	Penyediaan bahan logistik kantor	18.085.000	18.075.280	9.720
3	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	450.000	420.000	30.000
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.750.000	1.749.409	591
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	2.975.000	25.000
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.500.000	4.948.300	551.700

V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.000.000	9.000.000	0
1	PengadaanPeralatan dan Mesinlainnya	9.000.000	9.000.000	0
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	152.477.000	150.052.418	2.424.582
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	0	100.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.350.000	18.058.295	2.291.705
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.499.600	400
4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	130.527.000	130.494.523	32.477
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	126.821.000	117.416.209	9.404.791
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	115.811.000	106.466.209	9.344.791

2	Pemeliharaan dan MesinLainnya	1.010.000	950.000	60.000
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	10.000.000	10.000.000	0
VIII	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN	60.750.000	58.205.500	2.544.500
1	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahn di Tingkat Kecamatan	60.750.000	58.205.500	2.544.500
IX	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.012.000	303.500	708.500
1	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Non perizinan	1.012.000	303.500	708.500
X	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	34.591.000	34.380.400	210.600

1	PeningkatanPartisipasi Masyarakat Dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	13.500.000	13.489.400	10.600
2	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.091.000	20.891.000	200.000
XI	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.850.000	30.489.150	360.850
1	SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	25.850.000	25.489.150	360.850
2	HarmonisasiHubunganDenganTokoh Agama dan Tokohmasyarakat	5.000.000	5.000.000	0
XII	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	45.300.000	43.150.000	2.150.000
	PembinaanPersatuan dan KesatuanBangsa	45.300.000	43.150.000	2.150.000
JUMLAH		2.656.680.000	2.471.435.741	176.244.259

Tabel 3.17
Efisiensi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %	EFISIENSI
----	----------------------	----------	-----------	-----------	-----------

1	3	6	7	8	
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.325.000	1.313.000	99.09%	12.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	925.000	913.000	98,70%	12.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	400.000	100%	0
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.163.269.000	2.005.707.575	92.72%	157.561.425
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.919.000	1.981.382.575	92,63%	157.536.425
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.100.000	4.100.000	100%	0
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.250.000	20.225.000	99,88%	25.000
III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.500.000	1.250.000	83,33%	250.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.250.000	83,33%	250.000
IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29.785.000	29.167.989	98%	617.011

1	PenyediaanKomponenInstalsi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	100%	0
2	Penyediaanbahanlogistikkantor	18.085.000	18.075.280	99,95%	9.720
3	Penyediaanbahanbacaan dan PeraturanPerundang - undangan	450.000	420.000	93,33%	30.000
4	FasilitasKunjungan Tamu	1.750.000	1.749.409	99,97%	591
5	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	2.975.000	99,17%	25.000
6	DukunganPelaksanaanSistemPemerintahanB erbasisElektronik pada SKPD	5.500.000	4.948.300	90&	551.700
V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.000.000	9.000.000	100%	0
1	PengadaanPeralatan dan Mesinlainnya	9.000.000	9.000.000	100&	0
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	152.477.000	150.052.418	98,74%	2.424.582
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	0	0%	100.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.350.000	18.058.295	99,98%	2.291.705

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.499.600	87,38%	400
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.527.000	130.494.523	91,93%	32.477
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	126.821.000	117.416.209	94,06%	9.404.791
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.811.000	106.466.209	92%	9.344.791
2	Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	1.010.000	950.000	95,81%	60.000
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100%	0
VIII	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN	60.750.000	58.205.500	29,99%	2.544.500
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahn di Tingkat Kecamatan	60.750.000	58.205.500	29,99%	2.544.500

IX	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.012.000	303.500	99%	708.500
1	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Non perizinan	1.012.000	303.500	99,92%	708.500
X	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	34.591.000	34.380.400	99,05%	210.600
1	PeningkatanPartisipasi Masyarakat Dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	13.500.000	13.489.400	99%	10.600
2	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.091.000	20.891.000	98,60	200.000
XI	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.850.000	30.489.150	100%	360.850
1	SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	25.850.000	25.489.150	95,25%	360.850

2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	5.000.000	100%	0
XII	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	45.300.000	43.150.000	95,25%	2.150.000
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45.300.000	43.150.000	95,25%	2.150.000
JUMLAH		2.656.680.000	2.471.435.741	93,03%	176.244.259

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Padamara untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Dengan disusunnya Laporan Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang *accountable* dapat segera terwujud.

1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel **SKM** di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 88,75. Dari seluruh unsure pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsure pelayanan biaya/tariff sedangkan nilai terendah terdapat pada unsure waktu pelayanan

Berdasarkan tabel **SAKIP** di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 65,26 dari Target yang di rencanakan. Dari seluruh Komponen yang ada, nilai tertinggi terdapat pada komponen Perencanaan Kinerja sedangkan nilai terendah terdapat pada Komponen Pelaporan Kinerja.

Disamping hal tersebut terdapat pula program-program Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat yang dapat difasilitasi oleh OPD Kecamatan Padamara dan seluruhnya terealisasi 100%, sebagaimana terlampir.

Dari keseluruhan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja pada OPD Kecamatan Padamara Tahun 2023 dapat dinyatakan **"baik"**. Hasil ini dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tersebut berada pada rating 85 – 100 yaitu 88,75 hasil dari penilaian SKM

2. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan namun berbenturan dengan kegiatan dari tingkat pemerintahan di atasnya;
2. Sarana prasarana yang ada mengalami kerusakan pada saat dibutuhkan:
3. Tidak seimbangnya perkembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan kemajuan ataupun perkembangan teknologi.
4. Kurangnya komitmen ASN terhadap implementasi SAKIP

3. Strategi Pemecahan Masalah di Masa yang akan datang

- 1) Mempublikasikan dan Memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook,instagram,twiter).
- 2) Menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib Administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
- 3) Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa disampaikan kepada masyarakat pengguna layanan.
- 4) Membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

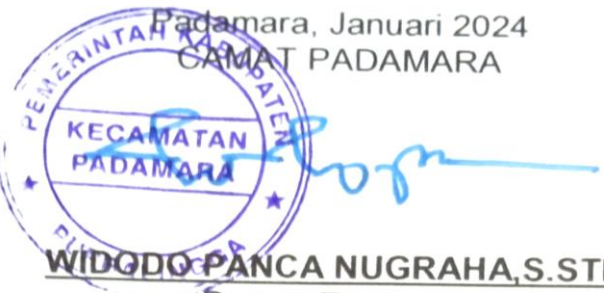
4. Tindak lanjut Rekomendasi atas LKJIP 2022

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Instansi Pemerintah, Kecamatan Padamara mengacu dan mempedomani Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai bahan perbaikan pada tahun 2023. Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Padamara telah disampaikan, Evaluator SAKIP memberikan 4 (empat) saran/rekomendasi kepada Kecamatan Padamara dan telah dilakukan upaya tindak lanjut Strategi Pemecahan Masalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan
- 2) Mencari/menggunakan sarana prasarana alternative dan melakukan perawatan sarana prasarana secara rutin
- 3) Memotivasi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang ada untuk mau mengejar kemajuan ataupun perkembangan teknologi
- 4) Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Padamara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Padamara Tahun 2023, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Padamara selama satu tahun anggaran, dan semoga dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD pada tahun berikutnya.

Padamara, Januari 2024
CAMAT PADAMARA



WIDODO PANCA NUGRAHA, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19820116 200012 1 002

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADAMARA TAHUN 2023

